



PROVINSI PAPUA
BUPATI YALIMO
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YALIMO
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI KABUPATEN YALIMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI YALIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Yalimo yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Yalimo yang pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Yalimo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

- Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara nomor 4803);
 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis sepadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengusahaan Sungai dan Bekas Sungai;
22. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

- 17/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yalimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2013 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN YALIMO
dan
BUPATI YALIMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN YALIMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Yalimo.
2. Bupati adalah Bupati Yalimo.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, dan jalan kabel.
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan

- menurunkan orang dan /barang serta perpindahan model angkutan;
7. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Yalimo, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
 8. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
 9. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman dan ruang depan pasar;
 10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
 11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, Karaoke, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
 12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 13. Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batuan dan mineral ikutannya.
 14. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 15. Kerusakan Lingkungan adalah kerusakan akibat – akibat penambangan atau pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan jalan.
 16. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pengaturan dan penegakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Yalimo;
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. Tertib lingkungan;
 - d. Tertib tempat dan usaha tertentu;
 - e. Tertib bangunan;
 - f. Tertib sosial;
 - g. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - h. Tertib peran serta masyarakat dan
 - i. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan

BAB III
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Setiap pengguna kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang akan melintasi jalan dalam kota dilarang melebihi rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Setiap Orang atau sekelompok orang dilarang meminta-minta di sepanjang jalan atau di dalam kendaraan umum serta mengganggu arus kendaraan lalu

lintas;

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. Membuang sampah di jalan dan tempat umum/sungai, selokan dan atau di luar tempat sampah yang tersedia;
 - b. Meludah pinang di jalan.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, Ruang Terbuka Hijau (RTH) beserta kelengkapannya;
 - b. Memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - d. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat tempat umum lainnya;
 - e. Memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan Ruang Terbuka hijau (RTH) tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Berjongkok, tidur dan berdiri di atas bangku taman serta membuang putung rokok, ludah pinang, sampah/ sisa makanan pada bangku taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengganti tanaman dengan kriteria ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 10

Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang bertempat tinggal di pinggir Jalan dan di bawah Jembatan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman dan tempat umum.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, selokan, terminal, bandar udara, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- b. Membuang air besar dan kecil di jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman, sungai dan saluran air.

BAB VI
TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU
Bagian Kesatu
Tempat Usaha
Pasal 13

Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha galian/pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

- (2) Pertambangan Mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: asbes, batu logam tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, traktit dan belerang ;
- (3) Dikecualikan dari objek Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (4) Pelanggaran yang ditimbulkan akibat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penghentian kegiatan dan penyitaan alat pertambangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis yang membidangi.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menggunakan/memanfaatkan jalan untuk kegiatan apapun yang dikomersialkan atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/ fungsi jalan.
- b. Berdagang atau menempatkan barang dagangannya dipinggir jalan dan trotoar, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.
- c. Merubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.

Pasal 17

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 maka barang dagangannya akan dilakukan penertiban.

Bagian Kedua Usaha Tertentu Pasal 18

- (1) Setiap pengelola atau pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya dengan disertai identitas masing-masing kepada Kepala Distrik melalui Kepala kampung setempat.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah Kost dilarang menerima tamu yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan atau identitas lainnya;
- (2) Pemilik/ Manajemen Hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah kost dilarang menerima/memasukkan tamu dibawah umur dan bukan istrinya di dalam kamar;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi pemilik dapat ditutup dan dicabut perizinannya, sedangkan kepada penghuni/ tamu yang bersangkutan akan diberikan pembinaan bersama orang tuanya.

Pasal 20

Setiap orang/badan dilarang :

- (1) Menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, taman, ruang terbuka hijau (RTH) dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
TERTIB BANGUNAN
Pasal 21

Obyek penertiban adalah bangunan berwujud fisik yang berdiri di atas tanah meliputi :

1. Bangunan Umum;
2. Bangunan Perniagaan / Jasa;
3. Bangunan Pendidikan;
4. Bangunan Kelembagaan;
5. Bangunan Rumah Tinggal;
6. Bangunan Menara, tower dan tugu.

Pasal 22

Prosedur penertiban adalah tata cara penertiban bangunan yang meliputi :

1. Teguran lisan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis;
2. Usulan Penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yalimo;
3. Surat Teguran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yalimo;
4. Pembongkaran dan Penyitaan oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo.

Pasal 23

Prinsip penertiban bangunan adalah keselarasan perumahan dan kawasan pemukiman menurut aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesesuaian lingkungan;

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang :

1. Mendirikan bangunan tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Mendirikan bangunan di sebidang tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan;
3. Mendirikan bangunan diruang Sempadan Jalan, Sempadan Sungai, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. Mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis keamanan, kenyamanan dan keselamatan;

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower telekomunikasi dan menempatkan alat tower dibangunan tempat ibadah atau gedung – gedung bertingkat, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi bangunan di sekitar menara/tower telekomunikasi tersebut.
- (3) Apabila orang atau Badan tetap membangun menara/tower telekomunikasi dan melanggar Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Maka Pemerintah Kabupaten Yalimo akan melakukan pembongkaran dan penyitaan.

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII TERTIB SOSIAL Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, Supermarket/mall, Rumah makan, Stasiun, Terminal, Pelabuhan udara, Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Penyelenggaraan pameran/bazar amal, Tempat hiburan/rekreasi, Hotel dan Tempat Ibadah kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Setiap Orang atau Badan dilarang Menyelenggarakan kegiatan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang dikaitkan dengan promosi penjualan barang/Jasa (Sales Promotion) sebelum mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. Melakukan aktivitas Sex Komersial dan mucikari,
 - b. Menjalankan kegiatan mengemis dan berdagang di jalan protokol atau di Traffic light;
 - c. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, Pekerja Sex Komersial(PSK);
 - d. Memakai jasa pekerja seks komersial (PSK);
 - e. Menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
 - f. Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau di tempat-tempat umum lainnya;
 - g. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan pengemis di Jalan protokol atau Traffic light;
 - h. Menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
 - i. Mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Yalimo dan bagi Pekerja Sek Komersial (PSK) yang berasal dari luar Kabupaten Yalimo akan dipulangkan ke daerah asalnya.

BAB IX TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan Rekreasi dan Hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gelanggang Renang,
 - b. Pemandian Alam,
 - c. Kolam Memancing,
 - d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan,
 - e. Bilyard,
 - f. Bioskop,
 - g. Teater atau Panggung Terbuka,
 - h. Gelanggang Olah Raga Terbuka,
 - i. Gelanggang Olah Raga Tertutup,
 - j. Balai Pertemuan Umum,
 - k. Kolam Renang,
 - l. Warnet dan

m. Café.

- (3) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang melakukan kegiatan perjudian secara terbuka dan terselubung.

Pasal 30

- (1) Tempat hiburan umum Cafe dilarang mempekerjakan pegawai di bawah umur;
- (2) Pengunjung dibawah umur dan berseragam sekolah dilarang melakukan kegiatan di dalam Cafe .
- (3) Tempat hiburan umum Cafe dilarang menjual minuman beralkohol diluar izin penjualan minuman beralkohol yang diperbolehkan;
- (4) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan Cafe yang telah mendapat izin dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
- (5) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat yang ditunjuk;
- (6) Setiap Pengelola tempat usaha Warung Internet (Warnet) dilarang menerima anak berseragam sekolah pada waktu jam pelajaran sekolah;
- (7) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) akan dihentikan kegiatan usahanya dan dicabut izin usahanya.

BAB X TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.
- b. Membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya;

Pasal 32

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman dan ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo.

Ditetapkan di Elelim
pada tanggal, 15 September 2014

BUPATI YALIMO
CAP/TTD
ER DABI

Diundangkan di Elelim
pada tanggal, 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YALIMO
CAP/TTD
GASPER LIAUW

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YALIMO TAHUN 2014 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA :
1/2014

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN YALIMO

SIGIT PRASETYO